

MASTERPLAN PUSAT PERKANTORAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Saeroji¹; Dirman Ruchban²; Mohammad Imran³; Nini A. Kiay Demak⁴;

Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo

saeroji42@gmail.com¹

ABSTRAK

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pusat pemerintahan berada di Bolaang Uki. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten yang baru terbentuk ini memiliki luas 1.615,86 km² dengan jumlah penduduk 87.012 jiwa. Semua kecamatan berada di pesisir Teluk Tomini dengan panjang garis pantai 290 km. (*BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*), Saat ini sistem pelayanan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum efisien karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih menggunakan bangunan rumah tinggal warga yang disewa untuk dijadikan sebagai gedung kantor dan letak antara SKPD sangat berjauhan.

Masterplan Pusat Perkantoran bertujuan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan dalam pemerintahan pusat setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan melayani kepentingan umum serta dapat berperan sebagai symbol filosofi, fungsional, teknis, monumental, serta memiliki fungsi keterbukaan yang menjadi cerminan kota atau Kabupaten tersebut. Metode yang digunakan merupakan metode perancangan arsitektur dengan pendekatan Arsitektur Post Modern karena cocok untuk karakteristik bangunan perkantoran yaitu lebih Rasional, modern dan menambahkan unsur klasik pada desain tersebut sehingga menggambarkan karakter gedung pemerintahan.

Kata Kunci : Masterplan, Kantor, Arsitektur Post Modern

PENDAHULUAN

Pusat Pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal mengenai politik dan pemerintahan. Pusat Pemerintahan tersebut selain sebagai pusat dari struktur ruang kota, dapat juga dipahami sebagai pusat kegiatan dari suatu kota atau wilayah bahkan suatu Negara. Permasalahan yang sering terjadi pada Kawasan pusat pemerintahan adalah tidak

terciptannya kawasan pemerintahan yang kuat dan konsisten. Disisi lain juga permasalahan yang timbul adalah terjadinya ketidakteraturan, ketidak efisienan dan tersendatnya proses kegiatan pemerintahan yang akibatnya berdampak pula terhadap masyarakat yang dilayani oleh pemerintah.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan gerak laju pembangunan sekarang ini, Kabupaten Bolaang mongondow Selatan tumbuh dan berkembang menjadi salah satu Kabupaten termaju di Sulawesi Utara. Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan tumbuh dan berkembang dengan cepat baik fisik wilayah, perekonomian, social, budaya, dan jumlah penduduk. Laju perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkaitan dengan tumbuhnya beberapa pusat perekonomian wilayah. Pembangunan di Bolaang Mongondow Selatan di segala bidang harus diiringi dengan pembangunan fasilitas pemerintahan sebagai pengendali pada sektor-sektor lain.

Saat ini sistem pelayanan pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum efisien karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih menggunakan bangunan rumah tinggal warga yang disewa untuk dijadikan sebagai gedung kantor dan letak antara SKPD sangat berjauhan. Tercatat Kantor SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 23 Kantor Termasuk Kantor Sekretariat Daerah dan Kantor Sekretariat DPRD dengan Jumlah pegawai sebanyak 1900 Jiwa dan melayani penduduk sebanyak 87.012 Jiwa. Pusat pemerintahan ini sangat penting maka dalam perancangan arsitektur ini penulis bermaksud mengangkat Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berlokasi di Desa Tabilaa Kec. Bolaang Uki, berdsarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan daerah ini merupakan daerah perkantoran.

Aktivitas pemerintahan ini membutuhkan suatu wadah yang disebut "*Pusat Perkantoran Pemerintahan*". Dimana kantor merupakan wadah aktivitas atau kegiatan dalam pemerintahan pusat setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan melayani kepentingan umum serta dapat berperan sebagai symbol filosofi, fungsional, teknis, monumental, serta memiliki fungsi keterbukaan yang menjadi cerminan kota atau Kabupaten tersebut. Pusat perkantoran tersebut membutuhkan suatu perencanaan secara makro terhadap *masterplan* yang akan menjadi dasar dalam penataan unit-unit bangunan SKPD yang ada di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat rancangan tentang "Masterplan Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan", penulis akan menggunakan desain arsitektur post modern karena cocok untuk karakteristik bangunan perkantoran yaitu lebih Rasional, modern dan menambahkan unsur klasik pada desain tersebut sehingga menggambarkan karakter gedung pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia meliputi, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Pemerintahan di Indonesia merupakan tatanan hukum yang dibentuk setelah meninggalkan tatanan hukum zaman belanda maupun jepang. Setelah dikumandangkannya proklamasi para pemimpin bangsa Indonesia membentuk sistem pemerintahan yang mandiri dikarenakan bangsa sudah merdeka. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau tepatnya 18 agustus 1945 Mulai disahkannya UUD 1945 sebagai bentuk landasan utama mengatur pemerintahan. Dengan begitu Indonesia sudah dapat menentukan arah pembangunannya berdasarkan landasan hukum yang sudah ditetapkan tersebut.

Setelah Undang-undang ditetapkan dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Calon yang ditetapkan pada awal pemerintahan bangsa Indonesia saat itu adalah Soekarno dan Hatta.

Berdasarkan Musyawarah dan mufakat akhirnya ditetapkanlah sekarno sebagai Pucuk pimpinan di Pemerintahan Republik Indonesia.

Setelah kepemimpinan di pemerintahan ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan pembagian teritorial wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 Wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 8 bagian provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, DI Yogyakarta hingga Sumatera. Setelah pembagian provinsi jelas ditentukan, maka dilanjutkan dengan para pemimpin yang akan memimpin di kementerian serta provinsi. Akhirnya diputuskan untuk dibentuk tiga belas kementerian di pemerintahan saat itu. Kemudian dalam kementerian tersebut ditetapkan pula dua belas departemen dan satu kementerian Negara.

Tidak lama setelah penetapan kementerian tersebut tepatnya tanggal 22 Agustus 1945 di lanjutkan dengan pembentukan KNIP atau disebut juga dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dimana fungsi dari Organisasi tersebut adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan membantu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Setelah itu Pada tahun 1973 Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 18/2/6 tanggal 15 Mei 1973, tentang penyusunan Rencana Pembangunan bagi Ibukota Kabupaten, maka pembentukan daerah otonomi baru mulai dilaksanakan untuk mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Dan dalam mengatur pemerintahan daerah agar lebih efisien maka pada suatu daerah dibutuhkan suatu wadah yang memusatkan kegiatan pelayanan pada daerah tersebut.

METODE PERANCANGAN

Pendekatan Perancangan dan Penekanan Desain

Pendekatan konsep Dasar terhadap elemen-elemen arsitektur pada bangunan akan terwujud dalam bentuk-bentuk baik bersifat nyata (fisik), maupun sesuatu yang abstrak pada bangunan tersebut. Pada Masterplan Pusat Perkantoran Pemerintahan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini menggunakan Penekanan Arsitektur Postmodern.

Tampilan pada bangunan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan pada suatu rancangan bangunan. Karena dengan tampilan bangunan dapat diketahui tema dari suatu bangunan yang akan dirancang.

Objek Perancangan

Objek yang ingin dirancang pada studi kasus ini adalah kawasan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berlokasi di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari survey lapangan dapat berupa : data primer (luas lahan/site, eksisting kawasan pemerintahan yang sesuai RTRW, kondisi topografi dan data-data mengenai profil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Sedangkan data sekunder yakni dari *google earth* yang penulis peroleh dari internet.

a. Data Primer

1) Mengukur luas lahan yang tersedia, mengambil dokumentasi lahan yang tersedia sesuai RTRW Kabupaten, mengetahui kondisi topografi, pengumpulan data mengenai profil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2) Mengetahui area kawasan Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Data Sekunder

1) Studi Literatur

Mengkaji skripsi sejenis, buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan perancangan kawasan wisata pantai dan diharapkan menjadi suatu acuan kepada pihak yang berkepentingan.

2) Penggunaan Peta

Diperoleh *google earth* berupa peta makro (peta Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan) dan peta mikro (peta site/tapak).

2. Pengolahan Data

- a. Data yang dikumpulkan dari survey lapangan dapat berupa : data primer (luas lahan/ Identifikasi masalah, menguasai masalah-masalah yang ada pada kondisi sebenarnya) dan dapat berupa data sekunder.
- b. Pengumpulan data dan informasi, dengan melakukan survey (observasi) lapangan, studi literatur, peta bahkan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten.
- c. Analisa data, dengan mengidentifikasi masalah dengan mengelompokkan dan mengkaitkan masalah yang satu dengan yang lain serta analisa mengenai visual, bentuk dan struktur terhadap penekanan desain yakni arsitektur postmodern.
- d. Sintesa, hasil analisa disimpulkan untuk memperoleh persyaratan tertentu dalam penentuan acuan perancangan arsitektur.
- e. Transformasi, menguraikan konsep atau acuan perancangan menjadi suatu produk desain yakni pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

ACUAN DAN LAPORAN PERANCANGAN

A. Acuan Perancangan Makro

1. Resume Lokasi dan Site

Salah satu hal yang cukup penting dalam resume lokasi dan site adalah dengan memperhatikan kriteria dan kondisi yang ada di lokasi dan site yang ada dan memenuhi beberapa syarat dalam penentuan suatu site kawasan :

- a. Lokasi *masterplan* telah memenuhi peruntukan fungsi kawasan perkantoran yang ada di RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Ditinjau dari sarana dan prasarana seperti jaringan listrik, air bersih,

telpon dan jalan serta sarana prasarana penunjang lainnya.

- c. Pencapaian yang mudah dari berbagai bagian kota.
- d. Daerah sekitar site belum terlalu padat dari pemukiman penduduk.
- e. Lingkungan yang tertib dan teratur.

2. Penzoningan Tapak

Kondisi tapak yang berada pada kompleks perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara umum masih belum tertata dengan baik, masih adanya sirkulasi yang tidak jelas, masih banyaknya area atau ruang luar yang masih terbengkalai dan belum jelasnya pembagian zona dalam tapak yang ada.

Oleh karena itu, akan dilakukan penzoningan terhadap tapak yang ada dalam kawasan perkantoran tersebut, pembagian zona berdasarkan karakteristik bangunan atau pembagian hirarki pekerjaan di masing-masing SKPD yang ada dalam *masterplan* tersebut

B. Acuan Perancangan Mikro

1. Klasifikasi Pengguna

Pengguna untuk *masterplan* pusat perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok pengelola
Adapun aktivitas dari Kelompok pengelola terdiri dari :
 - a) Mengelola sistem pelayanan
 - b) Mengembangkan dan memelihara fasilitas sehingga seluruh pengguna dapat menggunakannya dengan maksimal.
- 2) Pekerja/ASN
 - a) Melakukan pekerjaan pada masing-masing SKPD
 - b) Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di kompleks/kawasan perkantoran
- 3) Kelompok pengunjung
 - a) Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di kompleks/kawasan perkantoran

- b) Berkunjung atau membutuhkan informasi di masing-masing SKPD

2. Kebutuhan Ruang

Pendekatan dilakukan dari literatur-literatur dan objek lain yang sama kemudian digabungkan dengan kebutuhan ruang yang terjadi akibat aktivitas dalam objek yang diwadahi dalam ruang-ruang tertentu.

- a. Masjid
= 4.624 m²
 - b. Kantor Bupati
= 8.000 m²
 - c. Kantor SKPD
= 63.100 m²
 - d. Kantor DPRD
= 9.800 m²
 - e. Lapangan Upacara
= 6.500 m²
 - f. Parkir Masjid
= 3.600 m²
 - g. Parkir SKPD
= 4.200 m²
 - h. Parkir Kantor Bupati
= 6.000 m²
 - i. Danau Buatan
= 22.600 m²
 - j. Green Belt Area
= 20.600 m²
 - k. Area Pengembangan
= 26.800 m²
 - l. RTH
= 7.400 m²
 - m. Sirkulasi
= 69.176m²
- TOTAL**
= 257.624 M²

C. Laporan Perancangan

1. Data Fisik
Nama Proyek : Masterplan Pusat
Perkantoran Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
Lokasi Proyek : Blokplan perkantoran
Luas Tapak : **257.624 M²**
2. Perancangan Ruang Makro
 - a. Resume Lokasi dan Site
Adapun kriteria-kriteria untuk penentuan sebuah lokasi dan site yang

akan digunakan sebagai tempat pembangunan adalah :

- 1) Lokasi *masterplan* telah memenuhi peruntukan fungsi kawasan perkantoran yang ada di RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
 - 2) Ditinjau dari sarana dan prasarana seperti jaringan listrik, air bersih, telpon dan jalan serta sarana prasarana penunjang lainnya.
 - 3) Pencapaian yang mudah dari berbagai bagian kota.
 - 4) Daerah sekitar site belum terlalu padat dari pemukiman penduduk.
 - 5) Lingkungan yang tertib dan teratur.
- b. Pengolahan Tapak
- 1) Ukuran dan tata wilayah
Building coverage tapak adalah 30% dan 70% untuk *open space*. Adapun sempadan bangunan dimanfaatkan sebagai jalur penghijauan dan sirkulasi kendaraan bermotor.
 - 2) Zonase
Zonase tapak direncanakan berdasarkan tingkat *privacy* masing-masing kelompok kegiatan. Kegiatan pekerjaan yang membutuhkan tingkat ketenangan yang cukup tinggi diletakkan pada zona bagian dalam (kantor Bupati dan Kantor DPRD), sedangkan area publik pada bagian luar atau depan dekat dengan pintu masuk kawasan.
 - 3) Orientasi matahari dan angin
 - a) Orientasi terhadap sinar matahari
 - Mempengaruhi tata letak unit bangunan yang memiliki area lansekap yang luas serta pertimbangan terhadap pemanfaatan sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan
 - Area yang banyak menerima sinar matahari dapat dilindungi dengan penanaman pohon pelindung dan penggunaan overstek.
 - b) Orientasi terhadap angin
 - Mempengaruhi kenyamanan terhadap unit bangunan dalam site,

pemanfaatan arah angin sebagai penghawaan alami digunakan pada ruang melalui bukaan-bukaan yang ada.

4) Noise

Noise yang besar berasal dari jalan poros, oleh karena itu yang dapat dilakukan dalam desain bangunan sebagai pereduksi kebisingan yakni :

- a) Peninggian lantai dasar bangunan maksimal dua (2) lantai
- b) pemanfaatan unsur lansekap di sekeliling bangunan
- c) Membuat jarak bangunan depan lebih masuk ke dalam site.

c. Tata Ruang Luar

1) Pencapaian dan Sirkulasi

Sirkulasi dalam site didasarkan pada pertimbangan berdasarkan tingkat kemudahan dan keamanan sehingga disediakan area masuk sama dengan area keluar. Sirkulasi pada site yakni :

- a) Sirkulasi pejalan kaki,
- b) Sirkulasi kendaraan roda dua
- c) Sirkulasi kendaraan roda empat.

3. Perancangan Ruang Mikro

- a. Masjid = 4.624 m²
- b. Kantor Bupati = 8.000 m²
- c. Kantor SKPD = 63.100 m²
- d. Kantor DPRD = 9.800 m²
- e. Lapangan Upacara = 6.500 m²
- f. Parkir Masjid = 3.600 m²
- g. Parkir SKPD = 4.200 m²
- h. Parkir Kantor Bupati = 6.000 m²
- i. Danau Buatan = 22.600 m²
- j. Green Belt Area = 20.600 m²

k. Area Pengembangan = 26.800 m²

l. RTH = 7.400 m²

m. Sirkulasi = 69.176 m²

TOTAL = 257.624 M²

4. Sistem Utilitas

a. Sistem jaringan air bersih

Penggunaan air bersih untuk dalam bangunan air dari PAM. Air tersebut ditampung dulu dalam bak penampungan kemudian dialirkan ke masing-masing unit menggunakan pompa.

b. Sistem jaringan air kotor

Pembuangan air hujan dialirkan melalui pipa pada atap plat mengingat bangunan ini merupakan bangunan berlantai. Sedangkan limbah diolah terlebih dahulu melalui sewerage treatment untuk menghilangkan lemak yang ada pada limbah dari bagian dapur, laboratorium dan tempat praktikum.

c. Sistem jaringan listrik

Sumber utama berasal dari PLN dan pada saat listrik padam dapat menggunakan Genset. Energi cadangan sangat diperlukan apabila terjadi pemadaman dari PLN.

d. Sistem penanggulangan kebakaran

- 1) Tabung CO₂ ditempatkan ruang-ruang publik.
- 2) Sprinkler dengan *detector system* yang dihubungkan dengan alarm.
- 3) Pilar hydrant, diletakkan pada halaman dengan jarak antar hydrant 9 – 150 meter
- 4) *Fire hydrant*, berupa box berisi kapak dan selan air sepanjang 25 meter yang diletakkan pada tempat – tempat strategis, dengan standar pelayanan 800 m² / unit.
- 5) *Smoke detector*, diletakkan di setiap ruangan.

e. Sistem penangkal petir

- Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem tongkat franklin yang dipasang pada ujung atap.
- f. Sistem sirkulasi bangunan
Sirkulasi horizontal dalam bangunan menggunakan selasar, sedangkan sirkulasi vertikal menggunakan tangga.
 - g. Sistem pembuangan sampah
Pada setiap ruangan disediakan tempat sampah yang kemudian diangkut ke tempat penampungan sampah sementara oleh petugas *cleaning service* untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan akhir yang diangkut dengan mobil sampah.
5. Sistem Pengkondisian Bangunan
- a. Sistem pencahayaan
Sistem pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.
 2. Pencahayaan alami
Memanfaatkan cahaya matahari dengan menghindari pengaruh negatifnya seperti kemungkinan masuknya sinar matahari langsung.
 2. Pencahayaan buatan
Dimanfaatkan untuk ruang-ruang yang kurang/tidak mendapatkan sinar matahari seperti pada koridor dan pada saat langit mendung atau waktu malam hari yang tidak ada cahaya langit (sinar matahari).
 - b. Sistem penghawaan
Sistem penghawaan yang digunakan adalah penghawaan alami dan penghawaan buatan.
 1. Penghawaan alami
Memanfaatkan angin dengan menggunakan ventilasi silang yakni pengaliran udara dari satu sisi ke sisi lainnya.
 2. Penghawaan buatan
Penghawaan buatan diperlukan untuk memberikan kenyamanan di dalam ruang yang kurang mendapatkan penghawaan alami yang baik. Sistem penghawaan

buatan yang digunakan yakni dengan penggunaan AC split.

- c. Sistem akustik
Permasalahan akustik merupakan masalah yang penting dicarikan solusi bagi Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini sebab perencanaannya harus mampu mencecah pantulan bunyi yang timbul baik dari ruang luar (*outdoor*) ke dalam site yang ada bahkan ke dalam ruangan di masing-masing unit. Adapun alternative yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penggunaan bahan – bahan yang mampu menyerap suara baik dinding, plafond maupun lantai
 - 2) Penataan ruang pada bangunan sesuai dengan karakteristik penggunaan ruangan bangunannya dan penggunaan unsur lansekap (jenis tanaman pereduksi bunyi) sebagai akustik alami.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masterplan Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini dengan kesimpulan adalah :

1. Lokasi terpilih berada pada blokplan/kawasan Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. *Masterplan* Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah: merencanakan suatu kawasan pengembangan yang menyediakan sarana aktivitas atau pun kegiatan pelayanan berkaitan dengan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang di hasilkan dari suatu proses berlokasikan di Kecamatan Bolaang Uki dengan penekanan arsitektur postmodern
3. Luasan masterplan Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sbb :
 - n. Masjid
= 4.624 m²
 - o. Kantor Bupati
= 8.000 m²

| | | | |
|--------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| p. | Kantor SKPD | = | 63.100 m ² |
| q. | Kantor DPRD | = | 9.800 m ² |
| r. | Lapangan Upacara | = | 6.500 m ² |
| s. | Parkir Masjid | = | 3.600 m ² |
| t. | Parkir SKPD | = | 4.200 m ² |
| u. | Parkir Kantor Bupati | = | 6.000 m ² |
| v. | Danau Buatan | = | 22.600 m ² |
| w. | Green Belt Area | = | 20.600 m ² |
| x. | Area Pengembangan | = | 26.800 m ² |
| y. | RTH | = | 7.400 m ² |
| z. | Sirkulasi | = | 69.176m ² |
| TOTAL | | = | 27.624 M² |

B. Saran

Selama melakukan suvey ataupun proses penyusunan dan perampungan Perancangan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat sejumlah faktor yang perlu dikembangkan atau diperluas. Oleh karena itu penulis memberikan saran ataupun masukan :

1. Pengembangan Perancangan adalah respon pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar dapat mengakomodir rancangan nantinya dalam pengembangan blokplan/kawasan perkantoran sudah ada acuan/masterplan yang siap bangun.

2. Dengan Perancangan ini, dapat dijadikan sebagai acuan atau contoh dalam perancangan blokplan/kawasan perkantoran yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Sulawesi Utara*.
- Badan Pertanahan Nasional. 2018. *Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*.
- Budiharjo, Eko. 1997. *Arsitektur Sebagai Warisan Budaya*. Jakarta : Djambatan.
- Ching, Francis DK. 1987. *Arsitektur: Bentuk, Ruang and Susunannya*. Jakarta : Erlangga.
- Julaihi, Wahid dan Bhakti, Alamsyah. 2013. *Teori Arsitektur Suatu Kajian Perbedaan Pemahaman Teori Barat dan Timur*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Mangunwijaya. 1988. *Wastu Citra*. Jakarta : Gramedia.
- Neufert, E. 1993. *Data Arsitek. Edisi Kedua. Jilid I*. Jakarta : Erlangga.
- Poerwadarminta WJS. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Snyder, James, C, dkk. 1985. *Pengantar Arsitektur*. Jakarta : Erlangga.